

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN MANDATORY DISCLOSURE (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015)

THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURE ON COMPLIANCE LEVEL OF MANDATORY DISCLOSURE (Empirical Study of The Listed Banking Corporation In Indonesia Stock Exchange Period 2010-2015)

Oleh : **Amida Dhestiana Musaffa**

Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
amidadhestiana@gmail.com

Prof. Sukirno, S.Pd., M.Si., Ph.D.

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*; dan (2) Pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode pengumpulan data dokumentasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan sektor perbankan di BEI periode 2010-2015 melalui situs www.idx.co.id. Sampel penelitian ini sebanyak 72 perusahaan yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, (2) jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, (3) kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, dan (4) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Kata Kunci: Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, *Mandatory Disclosure*.

Abstract

The purposes of this research are to investigate: (1) the effect of corporate governance on compliance level of Mandatory Disclosure; and (2) the effect of ownership structure on compliance level of Mandatory Disclosure. Data were collected by documentation. It was secondary data derived from company financial reports of the banking sector in BEI period 2010-2015 was through the site of www.idx.co.id. The sample of this research was obtained by purposive sampling method and consisted of 72 company. The analysis technique used was quantitative analysis. The results of this research show that: (1) total members of the board of commissioners has an effect on the compliance level of mandatory disclosure, (2) total member of audit committee has an effect on the compliance level of mandatory disclosure (3) managerial ownership has an effect on the compliance level of mandatory disclosure, and (4) institutional ownership doesn't effect on the compliance level of mandatory disclosure.

Keywords: Board of Commissioners, Audit Committee, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Mandatory Disclosure.

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang berlaku secara internasional di setiap negara dan diterapkan di perusahaan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan. Perlu adanya peraturan yang diterapkan di perusahaan mengenai pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) untuk melindungi kepentingan *stakeholders* karena tanpa adanya peraturan ini dapat membuat perusahaan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan. Manajemen sebagai sumber pembuatan laporan keuangan memiliki peluang yang besar untuk menyembunyikan informasi dari investor demi kepentingan pribadi seperti bonus dan insentif.

Beberapa tahun terakhir, pengungkapan dan transparansi dalam laporan keuangan menjadi isu penting di Indonesia. *Forum for corporate governance in Indonesia* (FCGI, 2006) mempublikasikan sebuah survey yang dilakukan *Princewaterhouse and Coopers* pada tahun 1999 terhadap investor-investor internasional di Asia yang menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terendah

dalam bidang standar pengungkapan dan transparansi. Pengungkapan adalah cara yang efektif untuk mempublikasikan informasi terkait kondisi perusahaan kepada para *stakeholder*. Laporan keuangan yang diungkapkan tersebut diharapkan mampu memberikan informasi kepada investor dan kreditor dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi dana yang mereka kontribusikan untuk perusahaan. Untuk itu *stakeholders* menginginkan pengungkapan yang transparan dalam laporan keuangan.

Pengungkapan menurut Evans (2003) dalam Soewardjono (2005:578) adalah penyediaan informasi dalam statemen keuangan, catatan atas statemen keuangan dan pengungkapan tambahan berkaitan dengan statemen keuangan. Terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan (*required/regulated/mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary discosure*) (Suhardjanto, 2012)

Pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) di Indonesia telah diatur oleh Bapepam-LK melalui kepatuhan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: Kep-43/BI/2012 tentang

penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan public. Dengan adanya peraturan tersebut, maka seharusnya tingkat pengungkapan wajib di Indonesia mencapai tingkat yang ideal yakni 100 %. Namun penerapan peraturan tersebut nyatanya belum mampu menjamin terlaksananya praktek pengungkapan yang lebih tinggi. Hasil tersebut terbukti dengan hasil peneliti Utami *et al* (2012) yang menemukan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib di Indonesia baru mencapai 72,203 %.

Mandatory disclosure bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008), memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Al Akra *et al.*, 2010).

Mandatory disclosure sangatlah penting, karena semakin luas atau semakin banyak laporan keuangan yang diungkapkan, maka perusahaan akan dipandang berkualitas baik.

Kebutuhan pihak eksternal akan informasi keuangan perusahaan membuat tingkat kepentingan informasi keuangan tersebut meningkat.

Penerapan standar akuntansi saja belum cukup untuk mencegah adanya manipulasi laporan keuangan pada perusahaan yang dilakukan oleh manajemen, sehingga diperlukan *corporate governance* untuk mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Berbagai perusahaan di Indonesia yang semakin berkembang masih banyak menghadapi masalah-masalah yang apabila diamati, penyebabnya adalah lemah dan tidak diterapkannya *corporate governance* dengan baik. Tidak transparannya praktik dan pengelolaan suatu perusahaan mengakibatkan otoritas moneter sulit mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat perusahaan (Sitompul, 2006 dalam Venny, Rudi, dan Fara, 2011).

Perusahaan perbankan merupakan industri penting dan memiliki banyak resiko dalam menjalankan aktivitas operasinya dibandingkan dengan perusahaan manufaktur ataupun perusahaan lainnya, sehingga diperlukan transparansi agar aktivitas operasi dapat

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan menghindari kecurangan (M Hafiz et.al, 2015). Untuk meyakini perusahaan melakukan pengungkapan sesuai aturan, perlu dukungan mekanisme *corporate governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang telah dikenal sebagai suatu sistem pengawasan dan pengelolaan perusahaan. CG didefinisikan sebagai proses, struktur yang digunakan baik oleh pemegang saham, komisaris dan direksi dalam upaya meningkatkan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang saham jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder* lainnya, yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Clemente dan Labat (2005) menyebutkan bahwa *corporate governance* mempengaruhi pengungkapan. Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (2001), inti *corporate governance* di Indonesia adalah pada dewan komisaris, sehingga struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, termasuk komite yang berada di bawah dewan komisaris yaitu komite audit.

Selain adanya mekanisme *Corporate Governance*, menurut Barako (2007) struktur kepemilikan juga mempengaruhi pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Struktur kepemilikan yang berbeda dalam perusahaan akan memberikan pengawasan yang berbeda pula terhadap pengungkapan. Kepemilikan oleh manajemen dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Selain itu, persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan serta pengungkapan informasi keuangan (Boediono, 2005).

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menyelidiki adanya kemungkinan hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap

fenomena yang diteliti. Jenis data yang terdapat pada penelitian ini berbentuk angka sehingga termasuk dalam pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada pengumpulan data kuantitatif. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen yaitu Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional, sedangkan variabel dependen berupa Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*.

Populasi penelitian sebanyak 43 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling purposive*.

Teknik analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji nilai F dan Uji *Adjusted R²*. Statistik deskriptif meliputi rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), nilai minimum, nilai maksimum, dan jumlah (*sum*). Uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Uji regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional

terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Sedangkan uji nilai F untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara bersama-sama (simultan) terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Deskripsi Statistik Variabel

Variabel	Min	Mak	Mea	St.
	.	s.	n	Dev.
MANDS CR	0,78 8	0,98 4	0,91 0	0,038
JADK	2	9	5,31 9	1,875
JAKA	3	6	3,95 8	1,093
KM	0,00 0	0,28 2	0,01 5	0,053
KI	0,25 9	1,00 0	0,70 0	0,193

Mandatory Disclosure memiliki skor tertinggi sebesar 0,984 dan skor terendah sebesar 0,788. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar *Mandatory Disclosure* yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 0,788 sampai

0,984 dengan nilai tengah 0,91 pada standar deviasi 0,038.

Jumlah Anggota Dewan Komisaris memiliki skor tertinggi sebesar 9 dan skor terendah sebesar 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar Jumlah Anggota Dewan Komisaris yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 2 sampai 9 dengan nilai tengah 5,319 pada standar deviasi 1,875.

Jumlah Anggota Komite Audit memiliki skor tertinggi sebesar 6 dan skor terendah sebesar 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar Jumlah Anggota Komite Audit yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 2 sampai 6 dengan nilai tengah 3,958 pada standar deviasi 1,093.

Kepemilikan Manajerial memiliki skor tertinggi sebesar 0,282 dan skor terendah sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar Kepemilikan Manajerial yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 0,000 sampai 0,282 dengan nilai tengah 0,015 pada standar deviasi 0,053.

Kepemilikan Institusional memiliki skor tertinggi sebesar 1,000 dan skor terendah sebesar 0,259. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar Kepemilikan Institusional yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 0,259 sampai 1,000 dengan nilai tengah 0,700 pada standar deviasi 0,193.

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Hasil uji regresi linier berganda variabel independen yang terdiri dari Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama (simultan) terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* adalah sebagai berikut:

Variabel	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
JADK	3,747	0,000
JAKA	3,150	0,002
KI	3,677	0,000
KM	1,009	0,316

H1. Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Berdasarkan hasil uji statistik *t* variabel Jumlah Anggota Dewan Komisaris diperoleh nilai *t* hitung 3,747 lebih besar dari *t* tabel 1,66792. Sementara nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah Anggota Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat

kepatuhan mandatory disclosure. Dewan komisaris sangat berpengaruh dalam pengungkapan karena tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh dewan direksi serta memberi nasehat kepada dewan direksi (Muntoro, 2005). Dengan adanya dewan komisaris menjadikan pengawasan atas kinerja manajemen semakin ketat sehingga akan mencegah pihak manajemen melakukan kecurangan terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriyono et al (2014), dimana hasil penelitian membuktikan bahwa adanya pengaruh positif jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure. Dimana variabel anggota dewan komisaris memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,04, hasil ini lebih kecil dari level of significant yaitu 0,050 ($0,04 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, maka Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure semakin meningkat.

H2. Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure

Berdasarkan hasil uji statistik t variabel Jumlah Anggota Dewan Komisaris diperoleh nilai t hitung 3,3150

lebih besar dari t tabel 1,66792. Sementara nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah Anggota Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure. Komite Audit terbukti dapat membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan oleh manajemen untuk memenuhi peraturan yang berlaku. Jumlah anggota Komite Audit juga dapat meningkatkan kepatuhan mandatory disclosure dikarenakan dengan jumlah anggota komite audit yang banyak, pengawasan yang dilakukan komite audit akan semakin ketat yang akhirnya akan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriyono et al (2014), dimana hasil penelitian membuktikan bahwa adanya pengaruh positif jumlah Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure. Dimana variabel anggota komite audit memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,03, hasil ini lebih kecil dari level of significant yaitu 0,050 ($0,03 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit, maka Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure semakin meningkat.

H3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Berdasarkan hasil uji statistik t variabel Kepemilikan Manajerial diperoleh nilai t hitung 3,677 lebih besar dari t tabel 1,66792. Sementara nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure. Komisaris yang memiliki saham perusahaan memiliki insentif lebih besar untuk melakukan monitoring sehingga akan mengurangi kecurangan dalam laporan keuangan (Beasley, 1996). Oleh karena itu, dengan adanya kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka tingkat kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan akan semakin tinggi. Hal ini juga disebabkan karena manajemen tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan melainkan juga berperan sebagai pemegang saham.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Widjayanti dan Wahidawati (2015), dimana hasil penelitian membuktikan bahwa adanya pengaruh positif Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure. Dimana variabel kepemilikan manajerial memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,002, hasil ini

lebih kecil dari level of significant yaitu 0,050 ($0,002 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure semakin meningkat.

H4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Berdasarkan hasil uji statistik t variabel Kepemilikan Manajerial diperoleh nilai t hitung 1,009 lebih kecil dari t tabel 1,66792. Sementara nilai signifikansi 0,316 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure. Hal ini dimungkinkan karena pihak institusi sebagai pemilik tidak begitu memperhatikan tingkat kepatuhan mandatory disclosure yang dilakukan perusahaan tetapi lebih memperhatikan informasi-informasi yang penting. Menurut Lee et al., dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007), investor institusional adalah pemilik sementara (transfer owner) sehingga hanya terfokus pada laba sekarang (current earnings). Perubahan laba sekarang dapat mempengaruhi keputusan investor institusional dalam pengambilan keputusan dalam penanaman saham. Karena kepemilikan institusional termasuk dalam pemegang saham tersebar, maka jika mereka menarik sahamnya akan

mempengaruhi nilai perusahaan, sehingga kepemilikan institusional belum mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan mandatory disclosure.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani (2016), dimana hasil penelitian membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure. Dimana variabel kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien regresi negative sebesar -0,013 dan tingkat signifikansi sebesar 0,475, hasil ini lebih besar dari level of significant yaitu 0,050 ($0,475 > 0,05$). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure. Kepemilikan institusional dimungkinkan tidak terlalu memperhatikan tingkat kepatuhan pengungkapan dan hanya menggunakan hasil akhir pada laporan keuangan.

H5. Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure

Model	F Hitung	Sig
Regr	8,18	0,00

ession	0	0
--------	---	---

Pada hasil Uji nilai F diperoleh nilai F sebesar 8,180 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh dan signifikans terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure pada sektor perbankan di Indonesia

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil lima kesimpulan, yaitu:

1. Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh positif signifikan serta nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,747 > 1,66792$).
2. Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure pada perusahaan perbankan yang

terdaftar di BEI tahun 2010-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh positif serta nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,3150 > 1,66792$).

3. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh positif serta nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,677 > 1,66792$).
4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,316 lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh serta nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,009 < 1,66792$).
5. Jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan

mandatory disclosure pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($8,180 > 2,51$) serta nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil tujuh saran, yaitu

1. Dalam periode pengamatan yang dilakukan tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* sebagian besar berada pada kategori tinggi sebesar 52,78 % namun belum maksimal, sehingga perusahaan harus lebih memperhatikan informasi yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan agar tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* dalam perusahaan dapat meningkat.
2. Bagi pemilik, manajemen dan dewan komisaris agar lebih memperhatikan tata kelola perusahaan secara serius, sehingga ketaatan dalam pengungkapan dapat meningkat.
3. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* baru mencapai 90,97 %, sehingga BAPEPAM harus lebih memperhatikan ketaatan perusahaan dalam mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan termasuk penerapan sanksi yang tegas terhadap

perusahaan yang belum patuh terhadap peraturan Undang-Undang yang berlaku.

4. Berdasarkan hasil penelitian, model regresi linear dalam penelitian menghasilkan nilai *Adjusted R Square* yang masih relatif rendah yaitu sebesar 0,228. Oleh karena itu hendaknya penelitian selanjutnya meneliti variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada perusahaan di Indonesia.
5. Bagi peneliti selanjutnya, menambah periode pengamatan sehingga sampel yang didapat bisa lebih banyak dan hasil penelitian yang diperoleh lebih akurat.
6. Peneliti selanjutnya menambahkan proksi tata kelola perusahaan yang lain selain yang telah digunakan dalam penelitian ini misalnya aktivitas rapat dewan komisaris, rapat komite audit atau kepemilikan asing yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* dalam perusahaan yang ada di Indonesia.
7. Menambahkan sampel dan jenis perusahaan yang lebih besar lagi dan bukan hanya dari perusahaan perbankan dimana tidak dapat menggambarkan seluruh jenis perusahaan yang ada di Indonesia

dan agar dapat mengetahui tentang tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* secara merata di seluruh perusahaan *go public*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adina, P., dan P. Ion. (2008). Aspect Regarding Corporate Mandatory and Voluntary Disclosure. *Journal Annals Faculty of Economics* 3(1): 1407-1411.
- Al-Akra, M., I.A. Eddie & M.J. Ali. (2010). The Influence of The Introduction of Accounting Disclosure Regulation on Mandatory Disclosure Compliance: Evidence from Jordan. *The British Accounting Review*(42): 170–186
- Barako, D.G. (2007). Determinants of Voluntary Disclosures in Kenyan Companies Annual Reports. *African Journal of Business Management* 1(5): 113-128.
- Beasley, M.S. (1996). An Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Direction Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review* 71(4): 443-465.
- Boediono, G.S.B. (2005). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Symposium Nasional Akuntansi VIII Solo*.

- Clemente, A.G. dan B.N. Labat. (2005). Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure: The Role of Independent Directors in The Boards of Listed Spanish Firm.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). (2001). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance.
- Jensen, M.C. and Meckling, W.H. 1976. The Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, (3): 305-360.
- Muntoro, R.K. (2006). Membangun Dewan Komisaris yang Efektif. *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia* 36 (11): 9-14.
- M, Hafiz.R.M et al. (2015). Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. *Proceeding Simposius Nasional Akuntansi*, Vol. 29 No. 2: 1-25.
- Rahmadhani. (2016). Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*.
- Suhardjanto, D., A. Dewi., Erna R., dan Firazania M. (2012). Ppengaruh Corporate Governance dalam Praktik Risk Disclosure di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 9(1): 16-30.
- Supriyono, E. dan Suhardjanto, D., dan Akhmad Abdul Mustaqim. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS di Indonesia. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Lombok: 1-26.
- Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Lampiran Nomor KEP-554/BL/2010 Tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Good Governance Corporation*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perencanaan pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Utami, W. D., Suhardjanto, D., dan S. Hartoko. (2012). Investigasi dalam Konvergensi IFRS Di Indonesia: Tingkat kepatuhan pengungkapan dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Widjayanti, S.A. dan Wahidawati. (2015). Pengaruh Struktur dan Mekanisme Corporate Governance pada Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS.

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi,
Vol. 4 No. 7: 2-21.